

DINAMIKA PERSAINGAN EMPAT PARTAI BESAR (PKI, PNI, MASYUMI, DAN NU) DALAM PEMILIHAN UMUM 1955 DI YOGYAKARTA

Oleh:
Tri Basuki
(12407141022)

Abstrak

Pemilihan umum merupakan indikasi suatu negara demokrasi. Partai politik menjadi wadah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Di Yogyakarta persaingan antar parpol terjadi dalam upaya memenangkan pemilu. Partai politik berlomba-lomba dalam menanamkan ideologi partai. Yogyakarta merupakan salah satu kota utama yang bertindak sebagai basis pemenangan partai di pulau Jawa. Persaingan antar parpol terus terjadi selama masa menjelang hari pemungutan suara. Kampanye menjadi wadah untuk menyuarakan partai kepada masyarakat. Penanaman ideologi masing-masing partai gencar dilakukan guna meraup suara yang sebanyak-banyaknya, sehingga terjadi konflik antar partai. Konflik terjadi karena parpol saling berebut dalam mengumpulkan massa pemilih yang berasal dari berbagai golongan. Konflik tersebut berdampak kepada pemenang hasil pemilu, pemerintahan, dan pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persaingan empat partai besar (PNI, PKI, Masyumi, dan NU) dalam pemilu 1955 di Yogyakarta. Mengetahui pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan dari hasil pemilu 1955 baik di parpol, pemerintahan, maupun pemilih.

Kata kunci: *Dinamika Persaingan, Partai, Yogyakarta*

A. Pendahuluan

Pemilu salah satu instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai wadah bagi anggota Parlemen yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan.¹ Pemilu juga menjadi salah satu tolok ukur dalam penentuan negara demokrasi, karena dengan peristiwa tersebut dapat diketahui seberapa besar tingkat demokrasi suatu negara. Pemilu pertama pada mulanya direncanakan

¹ Mohammad Mahfud M. D., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 60.

diselenggarakan pada Januari tahun 1946 oleh Kabinet Sjahrir I, jauh hari sebelum pemilu pertama dilaksanakan yakni pada tahun 1955, tetapi terpaksa ditunda berulang kali karena kekacauan akibat revolusi fisik.² Tahun 1955 menjadi pemilu pertama di Indonesia meskipun terdapat beberapa daerah yang telah melaksanakan pemilu lokal beberapa tahun sebelumnya. Beberapa daerah yang telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebelum agenda pemilu nasional dilaksanakan pada tahun 1955, diantaranya adalah pemilu di Karesidenan Kediri dan Surakarta pada tahun 1946, Kalimantan Selatan pada tahun 1948, Yogyakarta pada tahun 1951, Sulawesi pada tahun 1951 (Minahasa, Sangir-Talaud), dan Kotapraja Makassar pada tahun 1952.³ Keberhasilan pemilu lokal yang telah dilaksanakan menjadi suatu tonggak yang cukup kuat dalam pelaksanaan pemilu nasional.

Pada tahun 1950, janji-janji mengenai pemilihan umum nasional sudah sering dikemukakan oleh berbagai kabinet, akan tetapi langkah-langkah nyata ke arah itu selalu terhambat oleh gabungan beberapa faktor. Termasuk ke dalam hambatan itu, timbulnya urusan pemerintahan yang lebih mendesak dan gerakan menentang pemilu yang dilancarkan oleh sejumlah partai serta kelompok-kelompok anggota Parlemen Sementara.⁴ Pada awal tahun 1950-an, pemerintah mulai melakukan pembahasan mengenai pemilu masuk ke dalam agenda resmi.⁵

Daerah pemilu menurut UU No. 7 tahun 1953 pasal 15, terdiri atas 15 wilayah pemilihan. Daerah-daerah tersebut yakni, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta Raya, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara,

² Taufik Abdullah (ed.), *Indonesia dalam Arus Sejarah: Pasca Revolusi*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), hlm. 259.

³ Mohammad Nazir Salim, *Membayangkan Demokrasi Menghadirkan Pesta : Pemilihan Umum Yogyakarta, 1951*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm 6.

⁴ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hlm. 3.

⁵ Christine S. T. Kansil, *Inti Pengetahuan Pemilihan Umum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm. 58.

Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.⁶ Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk ke dalam wilayah di Jawa Tengah. Tanggal 29 September 1955 dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota-anggota DPR. Pada tanggal 15 Desember 1955 dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante.⁷ UU baru itu menetapkan pemilihan langsung yang akan diselenggarakan serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Belajar dari pengalaman pemilu Yogyakarta, dan pemilu India pada 1951-1952, Kabinet Wilopo memutuskan mengubah kebijakan pemilu kabinet-kabinet sebelumnya yang memilih sistem tidak langsung. Selain itu, akan diselenggarakan 2 pemilihan. Gagasan awal adalah bahwa suatu badan pekerja Parlemen akan dibentuk oleh suatu Dewan Konstituante hasil dari pemilu. Berbagai alasan politis dan konstitusional yang rumit terjadi seiring dengan gagasan awal tersebut, sehingga ditinggalkan demi terlaksananya pemilu untuk dua badan yang berbeda, yaitu Badan Parlemen dan Dewan Konstituante.⁸

B. Perkembangan Demokrasi di Yogyakarta Pada Tahun 1955

Yogyakarta merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia sejak merdeka, bahkan merupakan satu-satunya daerah istimewa sebelum Daerah Istimewa Aceh (DIA) terbentuk. Yogyakarta menjadi daerah istimewa satu-satunya lagi di Indonesia setelah Aceh mengganti nama provinsinya menjadi Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2004. Provinsi Yogyakarta atau nama resminya adalah DIY, terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota madya atau kodya. Wilayah-wilayah tersebut yakni, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul,

⁶ Herbert Feith, *op. cit.*, hlm. 95-103.

⁷ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1978), hlm. 73.

⁸ Kementerian Dalam Negeri, *Sekretaris Negara : Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950-1959 jilid 2*, berisi tentang Ketetapan Panitia Pemilihan Indonesia, 31 Juli 1955.

Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kodya Yogyakarta. Yogyakarta terbentuk dari Sultan *Ground* dan Pakualaman *Ground* yang membentang di lima wilayah tersebut.⁹

Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di pulau Jawa yang memiliki sumber daya manusia yang memadai. Data penduduk yang diperoleh menyatakan bahwa jumlah penduduk di Yogyakarta pada tahun 1955 adalah sekitar 2,018 juta jiwa. Jumlah penduduk yang cukup tinggi untuk wilayah yang tidak terlampau besar. Pertumbuhan penduduk di Yogyakarta mencapai 2% per tahun. Pertumbuhan penduduk tersebut tergolong tinggi, karena daerah-daerah lain pertumbuhan penduduknya dibawah 2%. Sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pedesaan yang tersebar di wilayah kabupaten. Kepadatan penduduknya tertinggi terjadi diperkotaan dengan mobilitas yang tinggi.¹⁰

Tabel 1
Jumlah Penduduk di Yogyakarta Tahun 1955

No	Nama Daerah	Jumlah penduduk	Laki-Laki	Perempuan
1.	Kota Yogyakarta	274.050	131.427	142.578
2.	Bantul	445.123	217.009	228.114
3.	Sleman	480.732	234.813	245.919
4.	Gunungkidul	491.484	240.189	251.295
5.	Kulon Progo	327.361	158.127	169.234
	Jumlah	2.018.750	981.610	1.037.140

Sumber : Badan Pusat Statistik, *Statistik: Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1950-1956*, (Yogyakarta: Sekretariat Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, 1957), hlm. 57.

Pemilu merupakan proses sekaligus sarana demokratis untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Pemilu merupakan proses sirkulasi elit yang bersifat inklusif

⁹ Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset, *Informasi Umum Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: DPPKA), 2013, hlm. 1.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *Statistik Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1963*, (Yogyakarta: Biro Statistika Daerah Istimewa Jogjakarta, 1964), hlm. 43.

dimana semua warga secara terbuka memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih. Melalui prosesi pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan beragam harapan, keinginan dan berbagai kepentingannya melalui pilihan-pilihan politiknya yang disalurkan dalam pemilu. Pada tataran idealitas-normatif, bahkan, melalui mekanisme pemilu inilah rakyat menentukan pilihan haluan kehidupan bernegara secara paripurna.¹¹

Penduduk di Yogyakarta adalah 2,018 juta jiwa dengan jumlah pemilih adalah 1,054 juta jiwa. Lebih dari 52% penduduk Yogyakarta memiliki hak untuk memilih. Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah pemilih yang paling banyak. Lebih dari 250 ribu masyarakat di Kabupaten Gunungkidul memiliki hak pilih. Kota Yogyakarta memiliki jumlah pemilih 140 ribu jiwa. Penduduk di Yogyakarta banyak tersebar di wilayah pedesaan yang mendiami kabupaten di Yogyakarta dan merupakan usia yang produktif.¹²

Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang pada saat itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi pada suatu negara modern. Gagasan mengenai penyelenggaraan pemilu telah muncul sejak awal kemerdekaan RI pada tahun 1945. Sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik.¹³

¹¹ Sofian Munawar Asgart, “Perilaku Pemilih di Kota Yogyakarta: Fenomena Pemilu 2004 dan 2009”, *Kompas*, April 2011.

¹² Muhammad Nazir Salim, *op. cit.*, hlm. 4.

¹³ Baskara T. Wardaya, “Membuka Kotak Pandora Pemilu 1955”, dalam *Basis*, (Vol. 3, No.4, 2004), hlm. 8.

Sistem pemilu pada pelaksanaan pemilu pertama tahun 1955 di Indonesia menggunakan sistem proporsional yang tidak murni.¹⁴ Sistem tersebut diambil sebagai jalan untuk membuat pemilu pertama di Indonesia itu berjalan lebih demokratis, sehingga dapat mencerminkan Indonesia yang demokratis di mata dunia. Sistem pemilu tersebut membuat pemilu pertama tersebut berlangsung adil. Sistem proporsional membuat perbandingan jumlah keterwakilan masyarakat pada jumlah tertentu tetap, artinya setiap beberapa ribu masyarakat memiliki jumlah perwakilan.

UU pemilu baru selesai dibahas oleh Parlemen pada masa pemerintahan Wilopo (3 April 1952 – 30 Juli 1953) dari PNI pada tahun 1953 yaitu UU No. 7 tahun 1953 tentang pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum pelaksanaan pemilu pada tahun 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia pada 29 September 1955 dan 15 Desember 1955 mendapatkan banyak pujian.¹⁵ Adapun pemilu di Indonesia yang akan dilaksanakan pada tahun 1955 didasarkan kepada: UUDS 1950, UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Konstituante dan Anggota DPR, UU Pemilu tahun 1953, dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 tentang Penyelenggaraan UU Pemilu 1953.¹⁶

C. Persaingan Partai Politik Tahun 1955 di Yogyakarta

Pemilu yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat yakni pada tahun 1955 telah membuat berbagi parpol berlomba-lomba dalam mengumpulkan kader dan massa pemilih. Pasalnya, untuk dapat kokoh dalam kekuasaan serta dapat berpengaruh di Indonesia, hal yang harus dipahami adalah kader dan massa pendukungnya. Untuk dapat memenuhi itu semua diperlukan berbagai macam cara dan pendekatan untuk dapat meyakinkan pemilih atau pendukung.

¹⁴ Gufon Fauzi, “Peran Politik NU pada pemilu 1955 di Indonesia”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2012), hlm. 133.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁶ Kementerian Dalam Negeri, *Dokumentasi Pemilihan Umum*, berisi tentang Peraturan-Peraturan dan Dasar Hukum.

Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah partai rakyat yang berasaskan sosio-nasionalis-demokrasi atau Marhaenisme. Asas ini merupakan gabungan dari asas nasionalisme dan sosio-demokrasi.¹⁷ Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai yang membawa ideologi komunisme sebagai jalan untuk menentukan masa depan bangsa kedepannya.¹⁸ PKI terbentuk dengan berasaskan kepada Marxisme-Leninisme. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) merupakan partai dengan mengusung ideologi Islam modern. Nahdlatul Ulama (NU) menjunjung tinggi tradisi dan Tradisionalisme yang melekat pada setiap golongan masyarakat, selain memegang teguh agama Islam. Ideologi yang dibawa oleh NU adalah Islam Tradisional.¹⁹

Proses kampanye pemilu berjalan sejak tahun 1953 sampai tahun 1955 atau 2 tahun yakni pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I. Masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I dapat dikatakan mempengaruhi secara luas kehidupan kepartaian maupun kehidupan pada masyarakat umum. Kegiatan partai-partai politik telah mengalami peningkatan, khususnya ideologi yang semakin menonjol, terutama mengenai masalah dasar negara.²⁰ Masa Kabinet Ali I suasana pemilu sudah mempengaruhi secara luas kehidupan kepartaian maupun kehidupan masyarakat umum, sehingga kegiatan partai-partai politik pun telah meningkat khususnya pada penonjolan ideologi, terutama berkisar pada masalah dasar negara.²¹

¹⁷ Widjanarko Puspoyo, *Dari Soekarno Hingga Yudhoyono: Pemilu Indonesia 1955-2009*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2012), hlm. 31-32.

¹⁸ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 399.

¹⁹ Fachry Ali, *Islam, Pancasila, dan Pergulatan Politik*, (Jakarta: Pustaka Antara Jakarta, 1984), hlm. 44.

²⁰ Imam Suhadi, *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977: Cita-Cita dan Kenyataan Demokrasi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981), hlm. 51-52.

²¹ Wilopo, *Zaman Pemerintahan Partai*, (Jakarta: Yayasan Idayo, 1976), hlm. 37.

Kampanye yang dilakukan dirasa gagal sebagai sarana dalam rangka mentransfer visi, misi, dan program calon-calon legislatif kepada masyarakat pemilih.²²

Pada umumnya kampanye berupa rapat umum, arak-arakkan dengan mempergunakan alat pengeras suara, menempel poster-poster di tempat yang strategis, dan menyebar surat-surat selebaran. Kampanye model pertemuan-pertemuan diselenggarakan di semua tingkatan, di alun-alun kota atau di balai desa, dengan para pembicara biasanya didatangkan dari Jakarta atau tokoh-tokoh partai setempat, rapat umum atau rapat anggota, pertemuan dengan pemuda, ceramah umum, pemutaran film, perayaan ulang tahun atau pawai, dan perayaan hari-hari besar agama.²³

PNI mengajak tokoh-tokoh penting partai dalam menjadi juru kampanye pemengangan partai di Yogyakarta, misalnya dengan adanya Sunarjohadi, Karkono, Purwokusumo, Sahir Nitihardjo, dan Prodjoprakosa.²⁴ Salah satu cacatan penting yang terjadi pada masa kampanye ini adalah, sebenarnya PNI telah melakukan pelanggaran aturan kampanye yang telah disampaikan oleh Perdana Menteri Burhanudin Harahap. Peraturan tersebut yakni menggunakan gambar atau nama Kepala dan atau Wakil Kepala Negara RI, karena dirasakan sebagai perintah terang-terangan atau perintah halus kepada para pemilih untuk ikut memilih partai atau golongan tersebut, dengan menggunakan pengaruh yang ada pada Kepala Negara RI.²⁵

Kampanye PKI menjanjikan *land-reform* dan kepemilikan lahan-lahan, baik lahan perkebunan maupaun lahan pertanian dan pabrik-pabrik. *Land Reform*

²² Dias Prasongko, "Politik Identitas dalam Kampanye", *Kabare Kagama*, Mei 2014, hlm. 20.

²³ Burhaman Djunedding, "Pesta Demokrasi Di Daerah Bergolak: Politik Tingkat Lokal Dan Pemilihan Umum 1955 Di Sulawesi Selatan", *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010), hlm. 167.

²⁴ Badan Pusat Statistik, *op. cit.*, hlm. 13-14.

²⁵ Sekretariat Negara, *Kabinet Perdana Menteri RI Kepada Semua Pejabat atau Gubernur Seluruh Indonesia*, tentang Kampanye Pemilihan Umum, 9 September 1955.

adalah semangat juang kaum buruh tani untuk merebut tanah dari tangan tuan tanah, sehingga menjadikan tanah sebagai milik petani.²⁶ Artinya mulai telah terjadi persaingan dalam kampanye. Persaingan saling berebut kepentingan terasa mencolok ketika terjadi perebutan massa buruh di Yogyakarta maupaun di daerah-daerah lain di Indonesia.

Mayumi memiliki tokoh yang memiliki peranan penting dalam upaya pemenangan partai antara lain, Achid Masduki, Sastrowardjo, Fachruddin, Hammam Hasjim, dan Hardjodisastro.²⁷ Tokoh tersebut memiliki peran sebagai juru kampanye dan mencari massa pemilih yang banyak di Yogyakarta. Semboyan atau jargon untuk kampanye juga tidak luput dari perhatian Masyumi, tentunya untuk membuat masyarakat percaya dan memang mengemban tuntutan masyarakat kebanyakan. Semboyan dari Masyumi adalah “menurunkan harga-harga kebutuhan rakyat, pemberantas korupsi, dan menjunjung tinggi derajat wanita.”

Kiprah politik NU pada era menjelang pemilu cenderung memposisikan dirinya sebagai partai yang mewakili aspirasi umat Islam, khususnya kaum pesantren. Dengan demikian, banyak-upaya upaya yang dilakukan oleh pengurus PBNU agar memenangkan partai NU. NU menggunakan frasa-frasa dalam versi yang dijawakan. Penggunaan sistem tanggalan Jawa untuk menarik perhatian atau simpati dari khalayak tradisional.²⁸ NU melalui perwakilan di Jawa Tengah yakni, H. Saifoeddin Zoechri menyampaikan bahwa NU memiliki 3 kekuatan pokok yakni, politik, material, dan organisasi. NU memiliki cita-cita mewujudkan negara Indonesia sebagai negara demokrasi atas dasar Islam dan menjadikan agama Islam sebagai dasarnya.

Konflik-konflik antar partai sedikit demi sedikit mulai terasa. Sebagai contoh, terjadinya konflik antara tokoh-tokoh dalam sebuah kehidupan primordial agama

²⁶ Taufik Abdullah (ed.), *op.cit.*, hlm. 62.

²⁷ Badan Pusat Statistik, *loc. cit.*

²⁸ Abdul Mundir, “Peran Politik NU Tahun 1952-1955”, dalam *Avatara*, (Vol. 2, No. 3, 2014), hlm. 628.

dalam konflik mereka dengan pemerintah yang berkuasa. Para tokoh tersenut berkonflik dengan sesama mereka disebabkan antara lain karena visi yang berbeda dalam melawan musuh dan perbedaan strategi yang digunakan. Contoh lain adalah konflik di dalam kelompok primordial yang didasarkan pada agama Islam di Indonesia. Partai-partai Islam di Indonesia meskipun mempunyai nilai-nilai primordial yang sama, namun sangat sulit untuk bersatu.²⁹

Konflik ideologis tumbuh berdampingan juga dengan timbulnya konflik-konflik yang bersifat politis yang merupakan pertentangan-pertentangan di dalam pembagian status, kekuasaan, dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya di dalam masyarakat. Konflik kepentingan yang bersumber dari konflik ideologis menggambarkan tentang politik di Indonesia khususnya pada masa menjelang pemilu yang juga merupakan konflik ideologis yang bersumber di dalam ketegangan yang terjadi di antara pandangan dunia tradisional (tradisi Hindu-Jawa dan Islam) di satu pihak dengan pandangan dunia modern (khususnya pandangan dunia barat) di pihak lain. Perwujudan konflik kepentingan ini diantara lima buah aliran pemikiran politik, yakni: Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam Sosialisme Demokrat, dan Komunisme.³⁰

Pemikiran-pemikiran mengenai ideologi partai kemudian mendatangkan persaingan, baik perebutan kaum maupaun yang lainnya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh parpol tentunya adalah untuk suatu kepentingan. Persaingan lebih ditekankan pada kepentingan-kepentingan parpol yang salah satunya mainkan pengaruh. Pemilahan ideologi telah memicu munculnya fragmenisasi politik, seperti tampak pada perdebatan dua kubu di Dewan Konstituante (antara kubu nasionalis Islam yang dimotori oleh partai-partai Islam semisal masyumi dan NU dengan kubu nasionalis sekuler yang dipimpin oleh partai-partai abangan semisal PNI dan PKI). Kubu nasionalis Islam menginginkan beberapa rumusan dari

²⁹ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (New York : Cornell University Press, 1962), hlm. 233-237.

³⁰ Nasikun, *op. cit.*, hlm. 71.

Piagam Jakarta dimasukkan kembali dalam konstitusi negara RI, sementara kubu nasionalis sekuler menolaknya.³¹

D. Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1955 di Yogyakarta

Pemungutan suara di Yogyakarta secara umum berjalan lancar. Sebagai sebuah sejarah demokrasi di Indonesia, pemungutan suara yang pertama tersebut menuai banyak pujian. Yogyakarta merupakan wilayah yang menjadi satu dengan daerah pemilihan Jawa Tengah, namun memiliki pemerintahan tingkat Provinsi tersendiri. Perolehan suara di wilayah Yogyakarta dapat diartikan sebagai cerminan keberhasilan parpol yang bersaing dalam kampanye. Banyaknya suara yang diperoleh oleh masing-masing parpol menjadi salah satu indikasi kokohnya parpol di suatu wilayah. Pendekatan-pendekatan terhadap kaum atau masyarakat golongan bawah menjadi alasan kokohnya suatu parpol.

Tabel 2

Perolehan Suara Pemilu Tahun 1955 di Yogyakarta

No	Kabupaten/ Kota	Nama Partai			
		PKI	PNI	Masyumi	NU
1.	Yogyakarta	44.321	21.879	18.153	11.291
2.	Gunungkidul	100.470	24.351	15.270	14.583
3.	Sleman	35.238	47.159	29.747	15.411
4.	Bantul	34.029	40.337	34.720	38.248
5.	Kulon Progo	23.812	73.464	36.630	19.948
Jumlah		237.870	207.190	134.520	99.511

Sumber : *Harian Rakjat*, “Di Djokjakarta, Ibukota Revolusi, PKI Menang”, Jakarta, 3 Oktober 1995. *Kedaulatan Rakjat*, “Daerah Istimewa Djogja”, 3 Oktober 1995.

Suara yang diperoleh masing-masing parpol mencerminkan penetrasi parpol kepada masyarakat. PKI memperoleh suara terbanyak di Yogyakarta, perolehan suaranya sekitar 237 ribu suara. Suara PKI sebagian besar berasal dari daerah jatung kebudayaan Jawa, yakni Jawa Tengah termasuk Yogyakarta dan bagian barat Jawa Timur. PNI sebagai partai yang paling dominan memperoleh

³¹ Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 101.

suara sebanyak 207 ribu suara. Mayumi dan NU yang sebelumnya merupakan satu partai dan sekarang adalah partai pecahan memperoleh suara dengan selisih yang cukup signifikan. Masyumi memperoleh suara sebanyak 134 ribu suara, sedangkan NU hanya memperoleh 99 ribu suara.³² Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah dengan perolehan suara PKI mutlak terbanyak.

Perolehan suara setelah pemungutan berlangsung menjadi salah satu indikasi keberhasilan masing-masing parpol dalam hal kaitannya dengan penanaman paham yang dibawa. PKI memperoleh kemenangan yang cukup signifikan di Yogyakarta. Hal ini berkat seluruh usahanya untuk dapat merangkul masyarakat kelas bawah dan memberikan janji yang sangat menggiurkan dan memang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu. Yogyakarta disebut sebagai kota merah dengan kemenangan PKI. PKI memimpin perolehan suara di Yogyakarta secara keseluruhan dengan jumlah selisih suara yang cukup signifikan. Kemenangan PKI bukan saja soal kuantitas, tapi juga simbolik. Yogyakarta merupakan pertemuan harmonis antara masa silam atau tradisional dengan masa modernitas, bertemunya feodalisme dengan demokrasi dengan sangat lembut, serta bersatunya monarki dengan republik. Beberapa tahun setelah pemilu berakhir, aksi pembagian tanah semakin gencar dilakukan hingga tahun 1960-an.

Adanya peristiwa pemogokkan buruh yang di pelopori oleh PKI mengakibatkan perolehan suara di Kota Yogyakarta menjadi dominan kepada PKI. PKI menjanjikan berbagai hal yang berhubungan dengan kesejahteraan kaum buruh dan pekerja di Kota Yogyakarta selain di daerah pedesaan yang membidik kelas buruh tani. Kaum buruh didorong untuk melakukan pemogokkan, demonstrasi, rapat-rapat umum, dan aksi-aksi terpadu lainnya dari praktik-praktik birokrat dalam hubungannya dengan perburuhan dan di bidang-bidang lain, dari sikap reaksioner kaum kapitalis asing.³³ Kaum pekerja atau buruh membentuk koalisi dengan mengajak buruh-buruh lain untuk melakukan pemogokkan,

³² Herbert Feith, *op. cit.*, hlm. 122-123.

³³ Iskandar Tedjasukmana, *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia*, (New York: Cornell University, 1958), hlm 86.

sehingga terjadi pemogokkan massal yang besar-besaran. Petinggi perusahaan yang kebanyakan merupakan pendukung PNI yang berasal dari kaum elit menimbulkan kegelisahan. Kaum pekerja yang menjadi mayoritas lebih condong ke arah PKI menjadikan perolehan suara PKI di Kota Yogyakarta menjadi tinggi dan menjadi partai pemenang pada pemilu.³⁴

Hanya terdapat empat partai yang memperoleh suara lebih dari 10% dan mempengaruhi aliran ideologi dalam masyarakat. Keempat parpol tersebut adalah, PNI dengan gagasan politik nasionalisme radikal, Masyumi dengan gagasan politik politik Islam, NU dengan gagasan tradisional Jawa, dan PKI dengan gagasan politik Komunis.³⁵ Keberhasilan menyelenggarakan pemilu tentu tidak dapat seketika disimpulkan Indonesia telah berhasil mewujudkan demokrasi substantif, meskipun demokrasi elektoral adalah prasyarat dan bagian esensial bagi demokrasi substantif.

Masing-masing parpol yang berkuasa di Parlemen atau partai besar mulai menunjukkan eksistensinya. PNI tetap mengusung ideologi Nasionalisme atau Marhaenisme. PKI tetap dengan ideologi Sosialisme Komunisme. Masyumi juga kokoh dengan ideologi Islam Modernisme dan NU juga tetap dengan ideologi awal yakni Islam Tradisionalisme. Pertentangan empat Parlemen partai besar ini cukup menghambat jalannya pemerintahan di Indonesia. Koalisi partai telah terbentuk, namun parpol dengan ideologi yang berbeda tetap sukar untuk dilebur. Perolehan kursi baik di Parlemen maupun Dewan Konstituante yang banyak diperoleh oleh partai besar menjadi salah satu alasan kuatnya pengaruh masing-masing parpol.

Hingga tahun 1955 penduduk pedesaan di Yogyakarta tidak begitu memperhatikan pentingnya parpol saat itu. Rakyat hanya tahu parpol dari namanya saja dan mereka mengidentifikasi tiap-tiap partai dengan orang yang menjadi ketuanya atau para aktifisnya, karena sedikit sekali penduduk yang

³⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

³⁵ Khusna Indah Wijayanti, "Dinamika Politik di Kota Magelang pada Pemilu 1951", 2014, *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2014), hlm. 22.

menyatakan diri sebagai anggota partai. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh partai-partai politik besar di tahun 1955 yaitu untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya semakin memperkuat organisasi partai serta memperbaiki jalur-jalur komunikasi dari pusat ke ranting-ranting di kecamatan dan pedesaan. Ini juga memerlukan kegiatan propaganda mereka ke berbagai daerah dalam lingkungan Yogyakarta yang tak pernah dijangkau parpol sebelumnya dan meningkatkan hubungan antara partai-partai dengan penduduk di wilayah itu. Cara-cara yang digunakan oleh berbagai parpol dalam kampanye pemilu bisa dikategorikan dalam beberapa bagian, yaitu rapat raksasa yang diadakan di lapangan terbuka yang bisa dikunjungi setiap orang, ceramah di dalam gedung, rapat-rapat kerja dan kunjungan ke rumah-rumah penduduk.³⁶

E. Kesimpulan

Yogyakarta merupakan salah satu kota utama yang bertindak sebagai basis kemenangan partai di pulau Jawa. Persaingan antar-parpol terus terjadi selama masa menjelang hari pemungutan suara. Kampanye menjadi wadah untuk menyuarakan partai kepada masyarakat. Penanaman ideologi masing-masing partai gencar dilakukan guna meraup suara yang sebanyak-banyaknya, sehingga terjadi konflik antar partai. Konflik terjadi karena parpol saling berebut dalam mengumpulkan massa pemilih yang berasal dari berbagai golongan. Konflik tersebut berdampak kepada pemenang hasil pemilu, pemerintahan, dan pemilih.

PNI memiliki ideologi Nasionalis Marhaenisme, PKI memiliki ideologi Sosialisme Komunisme, Masyumi memiliki ideologi Islam Modernisme, dan NU memiliki ideologi Islam Tradisionalisme. PNI yang terbentuk dari golongan kelas elit dan birokrasi mengumpulkan massa dari berbagai golongan masyarakat, khususnya kelas elit. PKI lebih menfokuskan kepada golongan masyarakat yang berasal dari kelas bawah misalnya, kaum buruh dan petani. Masyumi memiliki pandangan untuk mengumpulkan massa dari berbagai kaum masyarakat yang

³⁶ Selo Soemardjan, *Social Changes In Jogjakarta* (Itachi: Cornel University Press, 1962), hlm. 148-150.

beragama Islam, karena Masyumi memiliki cita-cita untuk mewujudkan negara Islam di Indonesia. NU memiliki pendekatan lebih kepada golongan Islam yang lebih tradisional dan memegang teguh tradisi Indonesia, sehingga kaumnya banyak berasal dari masyarakat tradisional dan pesantren. PKI memperoleh suara terbanyak di Yogyakarta mengalahkan PNI sebagai partai terbesar di Indonesia. Penertasi PKI melalui pendekatan terhadap golongan masyarakat kelas bawah semisal kaum buruh dan petani telah berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Kementerian Dalam Negeri, *Dokumentasi Pemilihan Umum*, berisi tentang Peraturan-Peraturan dan Dasar Hukum.

_____, *Sekretaris Negara : Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950-1959 jilid 2*, berisi tentang Ketetapan Panitia Pemilihan Indonesia, 31 Juli 1955.

Sekretariat Negara, *Kabinet Perdana Menteri RI Kepada Semua Pejabat atau Gubernur Seluruh Indonesia*, tentang Kampanye Pemilihan Umum, 9 September 1955.

Buku dan Artikel

Abdul Mundir, "Peran Politik NU Tahun 1952-1955", dalam *Avatara*, Vol. 2, No. 3, 2014.

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1978.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1963*, Yogyakarta: Biro Statistika Daerah Istimewa Jogjakarta, 1964.

Baskara T. Wardaya, "Membuka Kotak Pandora Pemilu 1955", dalam *Basis*, Vol. 3, No.4, 2004.

Christine S. T. Kansil, *Inti Pengetahuan Pemilihan Umum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset, *Informasi Umum Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: DPPKA, 2013.

- Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Fachry Ali, *Islam, Pancasila, dan Pergulatan Politik*, Jakarta: Pustaka Antara Jakarta, 1984.
- Feith, Herbert, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.
- _____, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, New York : Cornell University Press, 1962.
- Imam Suhadi, *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977: Cita-Cita dan Kenyataan Demokrasi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981.
- Iskandar Tedjasukmana, *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia*, New York: Cornell University, 1958.
- Mohammad Mahfud M. D., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Mohammad Nazir Salim, *Membayangkan Demokrasi Menghadirkan Pesta : Pemilihan Umum Yogyakarta, 1951*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Selo Soemardjan, *Social Changes In Jogjakarta* (Itachi: Cornel University Press, 1962), hlm. 148-150.
- Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Taufik Abdullah (ed.), *Indonesia dalam Arus Sejarah: Pasca Revolusi*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012.
- Widjanarko Puspojo, *Dari Soekarno Hingga Yudhoyono: Pemilu Indonesia 1955-2009*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2012.
- Wilopo, *Zaman Pemerintahan Partai*, Jakarta: Yayasan Idayo, 1976.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Gufon Fauzi, “Peran Politik NU pada pemilu 1955 di Indonesia”, *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2012, hlm. 133.
- Khusna Indah Wijayanti, “Dinamika Politik di Kota Magelang pada Pemilu 1951”, 2014, *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2014.

Burhaman Djunedding, "Pesta Demokrasi Di Daerah Bergolak: Politik Tingkat Lokal Dan Pemilihan Umum 1955 Di Sulawesi Selatan", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010.

Surat Kabar

Dias Prasongko, "Politik Identitas dalam Kampanye", *Kabare Kagama*, Mei 2014.

Harian Rakjat, "Di Djokjakarta, Ibukota Revolusi, PKI Menang", Jakarta, 3 Oktober 1995.

Kedaulatan Rakjat, "Daerah Istimewa Djogja", 3 Oktober 1995.

Sofian Munawar Asgart, "Perilaku Pemilih di Kota Yogyakarta: Fenomena Pemilu 2004 dan 2009", *Kompas*, April 2011.

Yogyakarta, 14 April 2016

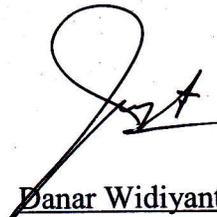
Pembimbing

Reviewer



Dina Dwikurniarini, M. Hum.

NIP. 19571209 198702 2 001



Danar Widiyanta, M. Hum.

NIP. 19681010 199403 1 001